

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin, dan Asikin, H. Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Faal, M., 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1993, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harijadi, Djoko Agung, dkk, 2013, *101 Tanya Jawab Seputar UU ITE*, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta.
- Hatta, Mohammad, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta.

- Hiariej, Eddy, O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta.
- Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Poerwadarinta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Schaffmeister, D, et.all., diterjemahkan oleh Sahetapy, J.E., 1995, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardi, Purdi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Meiatama, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Raharjo, Agus, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simandjutak, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Suhariyanto, Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Wahid, Abdul, dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.

Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2289 Tahun 1961).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang  
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang  
Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 10 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3192).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan  
Negatif (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1003  
Tahun 2014).

### **C. Jurnal**

Tobing, Raida, 2012, *Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*,  
Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik  
Indonesia, Jakarta.

Manzin, M., dan Biloslao, R, *Online Gambling: Today's Possibilities and  
Tomorrow's Opportunities*, Managing Global Transition, University  
of Primorska, Volume 6, Nomor 1, Januari Tahun 2008.

### **D. Internet**

Admin2, "Certified Hacking Forensics Investigator (CHFI): Teknik  
Identifikasi dan Analisis Cyber Crime", [http://www.informasi-  
training.com/certified-hacking-forensics-investigator-chfi-teknik-](http://www.informasi-training.com/certified-hacking-forensics-investigator-chfi-teknik-)

*identifikasi-dan-analisis-cyber-crime*, diakses pada tanggal 2 Februari 2017 Pukul 14.01 WIB.

Dea Chadiza, Syafina, “Indonesia Urutan Kedua Terbesar Negara Asal “Cyber Crime” di Dunia”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/12/06551741/Indonesia.Urutan.Kedua.Terbesar.Negara.Asal.Cyber.Crime.di.Dunia>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2016 Pukul 21.42 WIB.

Komunikasi dan Informatika, Kementerian, <https://www.kominfo.go.id/statistik>, diakses pada tanggal 13 Januari 2017 Pukul 13.45 WIB.

Sugiharto, Bintoro Agung, “Pengguna Internet di Indonesia Didominasi Anak Muda”, <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161024161722-185-167570/pengguna-internet-di-indonesia-didominasi-anak-muda/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2017 Pukul 21.31.

The Computer Ethics Institute, “Ten Commandments of Computer Ethics”, diakses dari <http://computerethicsinstitute.org/publications/tencommandments.html> pada tanggal 2 Februari 2017 pukul 12.10 WIB.